

**ANALISIS EFISIENSI PENDAPATAN ASLI DAERAH, DANA ALOKASI
UMUM DAN DANA ALOKASI KHUSUS PADA KINERJA KEUANGAN
DAERAH KABUPATEN WONOGIRI PADA TAHUN 2010-2016**



Disusun sebagai salah satu syarat menyelesaikan Program Studi Strata 1 pada
Jurusan Studi Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Disusun Oleh:

INDOMAS GUSTI MAREDH NESIA
B 300140011

**PROGRAM STUDI EKONOMI PEMBANGUNAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA
2018**

HALAMAN PERSETUJUAN

**ANALISIS EFISIENSI PENDAPATAN ASLI DAERAH, DANA ALOKASI
UMUM DAN DANA ALOKASI KHUSUS PADA KINERJA KEUANGAN
DAERAH KABUPATEN WONOGIRI PADA TAHUN 2010-2016**

PUBLIKASI ILMIAH

Oleh :

INDOMAS GUSTI MAREDH NESIA
B 300 140 011

Telah diperiksa dan di setujui untuk diuji oleh:

Dosen Pembimbing


Maulidiyah Indira, Ir, MS

HALAMAN PENGESAHAN

**ANALISIS EFISIENSI PENDAPATAN ASLI DAERAH, DANA ALOKASI
UMUM DAN DANA ALOKASI KHUSUS PADA KINERJA KEUANGAN
DAERAH KABUPATEN WONOGIRI PADA TAHUN 2010-2016**

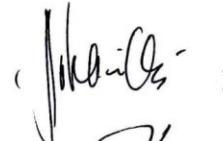


OLEH:

INDOMAS GUSTI MAREDH NESIA
B 300 140 011

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji
Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah Surakarta
Pada hari Sabtu 07 April 2018
Dan dinyatakan telah memenuhi syarat

Dewan Penguji:

1. Maulidyah Indira H., Ir, MS
(Ketua)
2. Muhammad Arif, SE, MEc.Dev
(Sekretaris)
3. Siti Fatimah NH, SE, Msi
(Anggota 2)

()
()
()

Mengetahui,
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah Surakarta


(Dr. Syamsudin, MM)
NIDN. 0017025701

PERNYATAAN

Dengan ini, saya menyatakan bahwa dalam naskah publikasi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi dan sepanjang pengetahuan saya tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka. Apabila ternyata kelak dikemudian hari terbukti ada ketidak benaran saya diatas, maka saya akan bertanggung jawab sepenuhnya.

Surakarta, 11 April 2018



Pengulis

INDOMAS GUSTI MAREDH NESIA

B 300 140 011

ANALISIS EFISIENSI PENDAPATAN ASLI DAERAH, DANA ALOKASI UMUM DAN DANA ALOKASI KHUSUS PADA KINERJA KEUANGAN KABUPATEN WONOGIRI TAHUN 2010-2016

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efisiensi antara pendapatan asli daerah, dana alokasi umum dan dana alokasi khusus dengan kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Wonogiri pada tahun 2010-2016. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data *time series*, yang meliputi variabel input dan output: pendapatan asli daerah, dana alokasi umum dan dana alokasi khusus tahun 2010-2016. Data ini diperoleh dari Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan. Alat atau metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan *Data Envelopment Analysis Program 2.1* untuk mengevaluasi kinerja suatu aktifitas dalam sebuah unit entitas atau organisasi. Hasil analisis *Data Envelopment Analysis* menunjukkan bahwa ada tiga tahun dari tujuh tahun yang diambil sebagai rentang waktu penelitian yang menunjukkan efisien dan lainnya tidak efisien.

Kata Kunci: kinerja keuangan daerah, rasio efektivitas, pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, dana alokasi khusus, *data envelopment analysis*

ABSTRACT

This study aims to analyze the efficiency between local revenues, general allocation funds and special allocation funds with the financial performance of Wonogiri Regency Government in 2010-2016. The data used in this study is time series data, which includes input and output variables: local revenue, general allocation funds and special allocation funds in 2010-2016. This data is obtained from the Directorate General of Fiscal Balance at the Ministry of Finance. The tool or method used in this research is using Data Envelopment Analysis Program 2.1 to evaluate the performance of an activity in an entity or organization unit. The results of the Data Envelopment Analysis analysis show that there are three years from seven years taken as the time span of the research indicating efficient and others inefficient.

Keywords: local financial performance, effectiveness ratio, local revenue, general allocation fund, special allocation fund, *data envelopment analysis*

1. PENDAHULUAN

Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah disebutkan bahwa Republik Indonesia menganut asas desentralisasi, asas dekonsentrasi dan tugas pembantuan dalam penyelenggaraan pemerintahan dengan memberi kesempatan dan keleluasaan kepada daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerah.

Otonomi daerah yang telah terlaksana dari per Januari 2001 memberikan peran yang lebih besar kepada pemerintah dan para pelaku ekonomi daerah dalam mengelola pembangunan di daerah. Tuntutan otonomi daerah tersebut muncul karena proses pembangunan di Indonesia sebelumnya telah mengakibatkan terjadinya kesenjangan pembangunan antara wilayah di Pulau Jawa dan luar Pulau Jawa ataupun dari Indonesia bagian barat maupun bagian timur. Kesenjangan tersebut terjadi karena adanya pengalokasian dana yang tidak merata yang berpengaruh pada ketidakseimbangan dalam pertumbuhan antar wilayah.

Dalam rangka menjalankan fungsi dan kewenangannya pemerintah daerah diharapkan mampu mencari sumber-sumber penerimaan keuangan sendiri khususnya untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan dan pembangunan dengan bertumbuh kepada Pendapatan Asli Daerah yang dimilikinya. Pendapatan Asli Daerah memiliki peran yang cukup signifikan dalam menentukan kemampuan daerah untuk melakukan aktivitas pemerintah dan program pembangunan daerah (Julitawati, 2012). Selain PAD, penerimaan daerah juga berasal dari Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Dana alokasi umum dan khusus merupakan dana yang berasal dari dana perimbangan. Dana perimbangan yang besar diterima dari pemerintah pusat akan memperlihatkan semakin kuat pemerintah daerah bergantung pada pemerintah pusat untuk memenuhi kebutuhan daerahnya.

Pemerintah daerah membutuhkan dana maupun pendapatan dalam melaksanakan pembangunan ataupun pertumbuhan ekonomi, dimana pembiayaan tersebut dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Searah pada tujuan otonomi daerah yaitu mengelola keuangan daerah secara baik dan sesuai. Menurut (Mardiasmo, 2002) dalam penelitian (Novlie, 2015) pelimpahan tanggung jawab

akan diikuti oleh pengaturan pembagian, pemanfaatan dan sumber daya nasional yang berkeadilan serta perimbangan keuangan pusat dan daerah. Dalam pengelolaan keuangan seharusnya dilakukan secara efisien, efektif serta optimal, karena ini mengenai target dan realisasi penerimaan daerah dan realisasinya.

Apabila pengelolaan keuangan sudah efisien dan efektif berarti bahwa adanya suatu jaminan ketersediaan dan pembangunan, dan kalau pengelolaannya belum efisien dan efektif maka perlu penekanan realisasi supaya pengelolaan mnejadi lebih baik dan akan menjamin ketersediaan dana untuk pembangunan itu sendiri, sehingga hal ini akan menjamin kemandirian keuangan daerah semakin lama semakin membaik.

**Tabel 1. Rasio Efektivitas Keuangan Daerah Kabupaten Wonogiri
Tahun 2010-2016**

Tahun	Rasio Efektivitas (%)	Keterangan
2010	111,63	Sangat Efektif
2011	111,35	Sangat Efektif
2012	107,90	Sangat Efektif
2013	49,80	Tidak Efektif
2014	111,30	Sangat Efektif
2015	108,60	Sangat Efektif
2016	94,70	Efektif

Dari Tabel 1 hasil dari Rasio Efektifitas pada kinerja keuangan pemerintah daerah Kabupaten Wonogiri sebagian besar dapat dikatakan sangat efektif dalam pelaksanaan realisasi kegiatan pada wilayah Kabupaten Wonogiri pada tahun 2010-2016. Adapun hasil Rasio Efektifitas yang hasilnya tidak efektif yaitu pada tahun 2013 dengan angka 49,80 %. Hasil Rasio Efektivitas yang sangat efektif ada pada tahun 2010, 2011, 2012, 2014 dan 2015.

Berdasarkan uraian diatas maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “ANALISIS EFISIENSI PENDAPATAN ASLI DAERAH, DANA ALOKASI UMUM DAN DANA ALOKASI KHUSUS PADA KINERJA KEUANGAN DAERAH KABUPATEN WONOGIRI PADA TAHUN 2010-2016”

2. METODE PENELITIAN

2.1 Jenis Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari peneliti dari berbagai sumber. Data sekunder yang digunakan adalah data deret waktu (*Time-series data*) untuk kurun waktu tahun 2010 sampai dengan 2016. Secara keseluruhan data-data yang diperoleh dari peneliti merupakan data yang diambil dari website resmi Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan (www.djpk.kemenkeu.go.id).

2.2 Metode Analisis Data

Penelitian ini menggunakan alat analisis Rasio Efektivitas untuk menghitung kinerja keuangan daerah. Rasio efektifitas merupakan tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan atau prestasi yang dicapai oleh pemerintah daerah yang diukur dengan membandingkan realisasi pendapatan dengan anggaran pendapatan. Rasio ini berhubungan dengan derajat keberhasilan suatu operasi pada sektor publik sehingga suatu kegiatan dikatakan efektif jika kegiatan tersebut mempunyai pengaruh besar terhadap kemampuan menyediakan pelayanan masyarakat yang sebagai sasaran yang sudah ditetapkan.

Berikut merupakan rumus dari perhitungan untuk rasio efektivitas kinerja keuangan daerah :

$$\text{Rasio Efektivitas} = \frac{\text{RealisasiPendapatan}}{\text{AnggaranPendapatan}} \times 100\%$$

Perhitungan diatas diukur dengan kriteria penilaian seperti tampak tabel dibawah ini :

Tabel 2. Kriteria Penilaian Rasio Efektivitas

Efektifitas Keuangan Daerah Otonom dan Kemampuan Keuangan	Rasio Efektivitas (%)
Sangat Efektif	>100
Efektif	>90-100
Cukup Efektif	>80-90
Kurang Efektif	>60-80
Tidak Efektif	<60

Sumber : Mahsun Moh (2006)

Serta menggunakan alat analisis *Data Envelopment Analysis* (DEA) untuk mengetahui tingkat efisiensi antara variabel input yaitu PAD, DAU dan DAK dengan variabel output yaitu Kinerja Keuangan daerah. Selanjutnya merupakan model dari *Data Envelopment Analysis* (Coelli.T, 1996) :

$$h_s = \frac{\sum_{i=1}^m u_i \cdot y_{is}}{\sum_{j=1}^n v_j \cdot x_{js}}$$

Dimana :

h_s = menunjukkan efisiensi pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus terhadap kinerja keuangan.

m = menunjukkan output pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus terhadap kinerja keuangan.

n = menunjukan input pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus terhadap kinerja keuangan.

U_i = bobot output i yang terdapat di pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus terhadap kinerja keuangan.

y_{is} = jumlah output i yang terdapat di pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus terhadap kinerja keuangan.

x_{js} = jumlah input j yang terdapat di pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus terhadap kinerja keuangan.

v_j = bobot input j yang terdapat di pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus terhadap kinerja keuangan.

Rasio efisiensi (h_s) kemudian dimaksimumkan dengan kendala sebagai berikut (Miller dan Noulas, 1996) :

$$h_s = \frac{\sum_{i=1}^m u_i y_{is}}{\sum_{j=1}^n v_j y_{js}} \leq 1$$

Analisis dari *Data Envelopment Analysis*:

$H_s = > 1$, apabila suatu sektor atau variabel yang memiliki nilai TE lebih dari 1 atau 0 sampai dengan 100% dapat dikatakan efisien.

$H_s = < 1$, apabila suatu sektor atau variabel yang memiliki nilai TE kurang dari 1 maka dapat dikatakan tidak efisien atau kurang efisien.

Apabila suatu variabel yang digunakan dalam penelitian keefisienan atau tidak jika nilai TE pada tiap DMU berkisar antara 0 sampai dengan 1 atau 0 sampai dengan 100%. Suatu DMU memiliki kemampuan paling baik jika nilai efisien relative sebesar 1 atau 100%, sedangkan DMU lain yang nilainya dibawah 100% dikatakan kemampuannya masih dibawah DMU yang telah efisien. Kesimpulannya adalah apabila suatu sektor atau variabel yang memiliki TE dibawah 1 maka nilai dapat dikatakan kurang efisien. Sedangkan sektor atau variabel yang memiliki TE diatas 1 maka nilai dapat dikatakan efisien.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam penelitian ini untuk mengukur Kinerja Keuangan Daerah menggunakan Rasio efektivitas Keuangan Daerah yang merupakan tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan atau prestasi yang dicapai oleh pemerintah daerah yang diukur dengan membandingkan realisasi pendapatan dengan anggaran pendapatan dalam satuan persen.

Tabel 3. Hasil Rasio Efektivitas Keuangan Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2010-2016

Tahun	Rasio Efektivitas (%)	Keterangan
2010	111,63	Sangat Efektif
2011	111,35	Sangat Efektif
2012	107,90	Sangat Efektif
2013	49,80	Tidak Efektif
2014	111,30	Sangat Efektif
2015	108,60	Sangat Efektif
2016	94,70	Efektif

Dari Tabel 4.4 hasil dari Rasio Efektifitas pada kinerja keuangan pemerintah daerah kabupaten Wonogiri sebagian besar dapat dikatakan sangat efektif dalam pelaksanaan realisasi kegiatan pada wilayah Kabupaten Wonogiri pada tahun 2010-2016. Adapun hasil Rasio Efektifitas yang hasilnya tidak efektif yaitu pada tahun 2013 dengan angka 49,80 %. Hasil Rasio Efektivitas yang sangat efektif ada pada tahun 2010, 2011, 2012, 2014 dan 2015.

Berdasarkan hasil perhitungan dengan menggunakan DEA, maka dapat diketahui tingkat efisiensi PAD, DAU dan DAK pada kinerja keuangan daerah tahun 2010-2016 dengan asumsi apabila nilai efisiensi 1 maka dapat dikatakan efisiensi dan sebaliknya, jika nilai efisiensi mendekati 0, maka inefisiensi. Berikut merupakan ringkasan hasil perhitungan dari DEA dalam pendekatan VRS :

Tabel 4. Hasil Perhitungan *Technical Efficiency* DEA

Tahun	<i>Technical Efficiency</i>
2010	1.000
2011	0.922
2012	0.888
2013	1.000
2014	1.000
2015	0.750
2016	0.519

Sumber: Hasil Olah data menggunakan DEAP 2.1

Berdasarkan Tabel 2 menunjukkan bahwa ada tiga yang mengalami tingkat efisiensi sempurna karena nilai *Technical Efficiency*-nya sebesar 1.000 atau 1. Dari pengambilan dari data *Time Series* yaitu tujuh tahun dari sampel ada tiga tahun yang mengalami efisiensi sempurna yaitu pada tahun 2010, 2013 dan 2014. Serta terdapat empat dari tujuh kurun waktu yang diambil untuk sampel yang mengalami tingkat efisiensi tidak sempurna yaitu pada tahun 2011, 2012, 2015 dan 2016. Pada tahun 2011 hasil *Technical Efficiency*-nya sebesar 0.922, tahun 2012 dengan hasil *Technical Efficiency*-nya 0.888, tahun 2015 dengan hasil *Technical Efficiency*-nya

0.750, tahun 2016 dengan hasil 0.519. Untuk hasil penelitian yang inefisien perlu penurunan output agar semakin baik dan efisien.

4. PENUTUP

4.1 Simpulan

Berdasarkan hasil analisis data yang telah dilakukan pada bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa tujuh tahun dari sampel ada tiga tahun yang mengalami efisiensi sempurna yaitu pada tahun 2010, 2013 dan 2014. Untuk hasil yang menunjukkan efisiensi berarti sudah efisien dalam kinerjanya. Serta terdapat empat dari tujuh kurun waktu yang diambil untuk sampel yang mengalami tingkat efisiensi tidak sempurna yaitu pada tahun 2011, 2012, 2015 dan 2016. Pada tahun 2011 hasil *Technical Efficiency*-nya sebesar 0.922, tahun 2012 dengan hasil *Technical Efficiency*-nya 0.888, tahun 2015 dengan hasil *Technical Efficiency*-nya 0.750, tahun 2016 dengan hasil 0.519. Untuk hasil penelitian yang inefisien perlu penurunan output agar semakin baik dan efisien.

4.2 Saran

Beberapa saran yang diajukan sehubungan dengan penelitian ini antara lain :

1. Berdasarkan hasil penelitian, teruntuk hasil TE yang sudah efisien untuk tetap menstabilkan pendapatan-pendapatan yang didapatkan kepada pemerintah daerah supaya efisiensi kinerja keuangan daerah tetap efisien. Untuk tetap memaksimalkan kinerja keuangan daerah, kontribusi-kontribusi pada penghasilan daerah juga perlu ditekankan kembali.

2. Bagi akademisi atau peneliti selanjutnya penelitian ini diharapkan dapat dijadikan referensi untuk penelitian selanjutnya. Perlu dilihat bahwa efisiensi kinerja keuangan daerah penting bagi kualitas penggunaan dana maupun pendapatan pada masing-masing otonomi daerah. Diharapkan untuk penelitian selanjutnya agar menggunakan variabel, tahun atau daerah yang lebih luas tidak hanya 1 wilayah saja. Sehingga hasil penelitian dapat memberikan pengetahuan dan informasi yang baru tentang efisiensi kinerja keuangan daerah.

3. Bagi pemerintah, diharapkan dapat menstabilkan kinerja keuangan pemerintah yang sudah dapat dikatakan baik dalam mengelola maupun mengalokasikan pendapatan maupun dana-dana yang diterima oleh pemerintah daerah.

Mengoptimalkan penghasilan daerah sehingga tidak banyak bantuan dari pemerintah pusat melalui alokasi dana yang di anggarkan oleh pemerintah pusat.

DAFTAR PUSTAKA

- Bisma, I Dewa Gede dan Susanto Hery. 2010. *Evaluasi Kinerja Keuangan Daerah Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun Anggaran 2003-2007*. Ganec Swara Edisi Khusus Universitas Mataram, Vol. 04, No. 03, hal 75-86
- Coelli. T. 1996. *A Guide to DEAP Version 2.1 : A Data Envelopment Analysis (Computer) Program*. Centre for Efficiency and Productivity Analysis. Universitas of New England
- Darise, Nurlan. 2006. *Pengelolaan Keuangan Daerah*. Penerbit : Indeks.
- Febriansyah, Abdullah. 2015. *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dan Alokasi Khusus Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Se-Sumatera Bagian Selatan*. Vol.3, No 1
- Halim, Abdul. 2004. *Akuntansi Sektor Publik, Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta: Salemba Empat.
- Halim, Abdul. 2007. *Akuntansi Sektor Publik, Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta: Salemba Empat.
- Herman & Sebastiana. V. 2016. *Analysis of Economic Performance as the Independence Indicators of Goverment in East Java Province*. Vol. 5, No.2
- Hamara, Krisna Dwipayana. 2014. *Pengaruh Dana Perimbangan dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Kinerja Keuangan (Studi Kasus Di Pemerintahan Kota Tasikmalaya)*. Jurnal Universitas Siliwangi. Hal. 1-12.
- Julitawati, Ebit. 2012. *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Perimbangan Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota Di Provinsi Aceh*. Vol. 1, No.1.
- Kuncoro, Mudrajat. 2014. *Otonomi Daerah Menuju Era Baru Pembangunan Daerah Edisi 3*. Jakarta : Erlangga.
- Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XV/MPR/1998 Tentang Otonomi Daerah

- Mahmudi, 2011. *Manajemen Kinerja Sektor Publik*. Yogyakarta : UPP STIM YKPN
- Mardiasmo, 2002. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta : Universitas Islam Indonesia Press.
- Masita, George & Wensy. 2014. *Analisis Kinerja Keuangan Daerah Di Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2007-2012*. Jurnal Berkala Efisiensi. Vol. 14, No. 02.
- Nikmah, Amran & Albert. 2014. *Analisis Perbandingan Kemampuan Keuangan Daerah Di Provinsi Sulawesi Utara (Studi Pada Kota Manado dan Kota Bitung Tahun 2008-2012)*. Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi. Vol. 14, No. 3
- Novlie, Debby & Sri. 2015. *Analisis Efisiensi dan Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara*. Vol. 17, No. 02.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2001 Tentang Pajak Daerah
- Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Keuangan Daerah
- Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pengukuran Kinerja
- Pramono, Joko. 2014. *Analisis Rasio Keuangan Untuk Menilai Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Kasus Pada Pemerintah Kota Surakarta)*. Vol. 7 No. 13
- Ratang, Sarlota. 2016. *Analysis of Financial Performance of Local Government Keerom Fiscal Year 2009-2013*. Journal of Social and Development Sciences. Vol.7, No.1
- Rukmana, Wan Vidi. 2013. *Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah Dan Dana Perimbangan Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau*. Jurnal Universitas Maritim Raja Ali Haji. Hal 1-15
- Rofiuddin, Muhammad. 2012. *Analisis Kinerja Keuangan Daerah Di Pulau Madura Provinsi Jawa Timur Dalam Era Otonomi Daerah Tahun 2005-2009*. Skripsi Thesis. Universitas Muhammadiyah Surakarta
- Ronald, Andreas. 2010. *Analisis Kinerja Keuangan dan Pertumbuhan Ekonomi Sebelum dan Sesudah Diberlakukannya Otonomi Daerah Di Kabupaten Kulon Progo*. Vol.01, No.01.
- Rosidin, Utang. 2010. *Otonomi Daerah dan Desentralisasi*. Bandung : Penerbit Pustaka Setia

Saputra, Dori. 2014. *Analisis Kemandirian dan Efektivitas Keuangan Daerah Pada Kabupaten dan Kota Di Provinsi Sumatera Barat*. Vol. 02, No. 01.

Sjafrizal, 2014. *Perencanaan Pembangunan Daerah Dalam Era Otonomi*. Jakarta: Penerbit Rajawali Press.

Suprianto. 2013. *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Pada Pemerintah Provinsi Gorontalo*. Jurnal Universitas Negeri Gorontalo

Susantih, H dan Saftiana, Y. 2009. *Perbandingan Indikator Kinerja Keuangan Pemerintah Provinsi se-Sumatera Bagian Selatan*. Jurnal Program Pascasarjana Akuntansi, Fakultas Ekonomi. Universitas Sriwijaya.

Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah.

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah

Wenny, Cherry. 2012. *Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Kinerja Keuangan Pada Pemerintah Kabupaten dan Kota Di Provinsi Sumatera Selatan*. Vol. 2, No. 1.

www.djpk.kemenkeu.go.id